

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Indopos

Call Center Dinas Sosial Susah Dihubungi

PSI Desak Pemrov DKI Bangun Sistem Data

JAKARTA-Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana meminta Pemprov DKI segera membuka data penerima bantuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara online.

Menurutnya hal ini perlu dilakukan lantaran masyarakat masih kesulitan dalam mengecek daftar penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI. Terlebih, bansos juga diberikan kepada buruh/pekerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus Corona (Covid-19) ini. "Penerima bansos kali ini tidak hanya masyarakat miskin, tapi juga ada pekerja informal dan formal yang kena PHK atau dirumahkan. Sebelumnya mereka kan enggak terdaftar," ucapnya, Selasa (14/4/2020).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini juga menyebut, satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mengecek daftar penerima bantuan ialah dengan menghubungi call center Dinas Sosial di nomor (021) 426 5115 atau menghubungi Ketua RW setempat.

Namun sangat disayangkan, nomor tersebut kini sulit dihubungi dan Ketua RW kerap kesulitan dalam memeriksa dan mengoreksi daftar penerima bantuan. "Sekarang yang tersedia hanya layanan call center dinas yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah," ujarnya.

Untuk itu, William pun menyarankan Pemprov DKI untuk mencontoh Pemkot Bekasi yang telah berhasil membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs bansosovid19.bekasikota.go.id.

Melalui situs itu, ia menyebut, masyarakat bisa dengan mudah mengecek apakah dirinya masuk dalam daftar penerima bansos hanya dengan memasukkan NIK. "Adanya sistem pendataan yang dapat diakses publik secara terbuka ini sangat penting. Tujuannya supaya warga mudah dalam mencari informasi bansos," kata William.

Belum Merata

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyebut pihaknya mengevaluasi pembagian bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI untuk warga yang terdampak kebijakan terkait virus Corona. DPRD DKI menilai pembagian bansos belum merata.

"Pembagian tidak semua, hanya 1,1 juta sekian warga. Ini bisa dipahami melihat kondisi keuangan tapi pastikan tepat sasaran," kata Zita Anjani, Selasa (14/3/2020).

"Bantuan Pemprov dari APBD. Beda dengan pusat yang belum tapi akan segera dibagikan berasal dari APBN," ungkap Zita. Dirinya menilai banyak warga yang justru butuh justru tak mendapatkan bansos. Menurutnya, pembagian bansos harus sesuai dengan data di lapangan.

"Tahap awal pembagian belum merata banyak warga membutuhkan yang justru tidak dapat, jadi ke depannya harus dicek real data di lapangan siapa yang memang benar membutuhkan. Adakan mekanisme daftar langsung lewat RW bagi yang membutuhkan," ujarnya. Zita meminta isi bansos yang dibagikan ke warga dinyatakan sehat. Serta pembagian bansos yang menerapkan physical distancing.

"Isi paket harus yang sehat. Distribusi harus sesuai protokol Kemenkes social+physical distancing," imbuhnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi bantuan sosial yang berdatangan untuk warga yang terkena dampak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait pencegahan pandemi Corona. Meski begitu, dia mengimbau agar semua dikordinasikan dengan Pemrov.

"Kita harga niat baik membantu saudara kita mengalami kesulitan, implan ekonomi di masa sekarang. Kami apresiasi, pembatasan sosial justru memunculkan solidaritas sosial karena membantu sesama. Kita apresiasi niat baiknya membantu," kata Anies, Senin (14/3).

Perlu Diawasi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyebut perlu ada pengawasan lebih terhadap pasar yang buka selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Banyak terjadi pelanggaran pembatasan sosial dan beberapa prosedur kesehatan selama masa wabah virus Corona (Covid-19).

"Pasar (makanan) kan tidak boleh tutup, kan ada juga pakai online tapi orang kadang kala, mungkin kebiasaan belanja secara langsung kan sulit dihindari, maka perlu diawasi. Orang lebih suka belanja melihat, itu tidak bisa dihindari tapi harus diawasi secara ketat," kata Taufik, di Jakarta, Senin (13/4/2020) malam.

Menurutnya, harus ada petunjuk dari Perumda Pasar Jaya menjaga dan memastikan bahwa tidak ada kerumunan besar. Selain itu, pastikan juga bahwa protokol kesehatan juga dilaksanakan oleh pedagang. "Saya kira supaya berkerumun orang, (harus) sesuai dengan protokol kesehatan berkaitan dengan Corona. Begitu," ucap Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Tersebut.

"Tinggal harus diawasi, masker wajib hukumnya dipakai, jadi harus diawasi secara ketat," ujarnya. Taufik memberikan contoh salah satu pasar yang menerapkan pengawasan. Pengawasan itu harusnya dilakukan di semua pasar di Jakarta.

"Saya kasih contoh, hari Minggu lihat Pasar Pantai Indah Kapuk, PIK. Pasar, tapi semua pakai masker, saya lihat juga ada pengawasan cukup ketat di sana, diberi tahu kalau di luar protokol kesehatan, itu dikasih tahu," kata Taufik.

Cukup Transparan

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengklaim, pendistribusian bantuan sembako bagi warga miskin oleh Pemprov DKI selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai sudah cukup transparan.

Dengan begitu, ia meminta agar warga terdampak PSBB akibat Corona untuk bersabar karena Pemda DKI telah menyediakan formulir pendaftaran melalui RT atau RW. Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyoroti masih terjadinya kerumunan orang di pasar-pasar saat masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Perlu ada penanganan khusus karena kerumunan sangat rawan sebagai lokasi penularan virus Corona (Covid-19).

"Pasar tradisional. Ya memang begitu adanya. Ya gimana. Memang masih bergerombol tapi tidak separah waktu normal. Tapi tetap aja. Ya gimana membatasinya ya. Paling sekuritinya mengatur. Swalayan saja masih yang masuk masih uyel-uyelan juga tapi memang tidak separah dulu. Cuma lumayan juga," kata Mujiyono di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Menurutnya, agak sulit melakukan sosial distancing atau pembatasan sosial di pasar. Pasti akan ada interaksi antara pembeli dan pedagang. "Iya sih, kalau saya ke pasar tiga hari sekali masih boleh.

Tapi suruh pakai masker, pakai sarung tangan. Kan nggak mungkin dihindari dengan jarak dua meter. Masa duitnya mau dilempar, susah juga. Kalau tidak berkerumun, berdesakan boleh, kalau jaga jarak ketentuan PSBB dua meter nggak mungkin," kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Tidak banyak petugas dari Perumda Pasar Jaya atau penjaga keamanan di pasar yang masih diizinkan beroperasi. Jadi, hal yang mungkin dilakukan adalah mengimbau pengunjung pasar menjaga jarak. "Sekuriti kan berapa orang, paling imbauan paling pas pakai speaker, (pasar) yang di bawah Pasar Jaya. Imbau, 'Ibu-ibu jaga jaraknya, harus tertib.' Kemudian paling pedagang juga harus comel (mengingatkan)," ujar Mujiyono.

Cuci Tangan

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Lukmanul Hakim mendirikan 200 tempat cuci tangan di dua kecamatan, yaitu Cengkareng dan Kalideres di Jakarta Barat. Kegiatan ini akan terus dilakukan hingga masa pandemi Covid-19 berakhir.

"Kegiatannya itu mulai pagi, itu kan 24 jam. Kita taruh di lingkungan mereka di tempat titik-titik yang berkumpul. Mereka datang, cuci tangan dan antusias sekali. Ada 200 titik," ujar Lukman saat dihubungi wartawan, Minggu (12/4/2020).

Anggota legislatif daerah pemilihan (Dapil) 9 wilayah Jakarta Barat ini mengatakan, dalam rangka mendukung kebijakan Pemrov DKI Jakarta untuk melawan Covid-19 harus ada ide-ide kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat di tengah wabah Corona saat ini. "Masyarakat sekarang kan kekurangan hand sanitizer, masker kan ini mereka kekurangan. Tetapi dengan adanya itikad baik ini, ya coba kita lakukan hal yang sederhana tapi bermanfaat bagi orang banyak di lingkungan masyarakat," kata Lukman.

Lebih lanjut dia menambahkan, tempat cuci tangan yang disediakan bagi masyarakat di dua Kecamatan di Jakarta Barat sengaja di letakkan di lingkungan warga sebagai fasilitas umum yang dapat digunakan oleh semua masyarakat. Karena itu, Lukman bekerja sama dengan pengurus RT setempat untuk menjaga dan merawat tempat cuci tangan agar dapat digunakan orang banyak di tengah wabah Covid-19.

"Itu kita adakan setiap hari, kita taruh di lingkungan mereka. Jadi ada rasa memiliki. Ketika airnya habis warga yang datang sendiri mengisi melalui RT-nya. Saya disediakan tempatnya dan sabun cuci tangannya, nanti air nya dari masyarakat setempat," ujar Lukman. (dni)